



Komnas HAM Minta Jokowi Prioritaskan Kasus Pelanggaran HAM

Reporter: **Francisca Christy Rosana**

Editor: **Rina Widiastuti**

Minggu, 21 Oktober 2018 06:57 WIB

0 KOMENTAR



Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat menerima Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung di Gedung Komnas HAM, Jakarta, 15 November 2017. YPKP 65 melaporkan bukti baru berupa penemuan kuburan massal di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. TEMPO/Subekti.

TERPOPULER

- 1 Selain Tina Talisa, 9 Tokoh Poles Jokowi - Ma'ruf Amin di Debat
- 2 Hasto Kristiyanto Goda Mardani PKS soal 2019 Ganti Presiden
- 3 Polisi Umumkan Bagus Bawana Tersangka Hoaks Surat Suara
- 4 Jenguk Arifin Ilham, Jokowi: Kami Mendoakan Beliau Cepat Sembuh
- 5 Cerita Warga Cianjur Berhamburan Saat Gempa Sukabumi Mengguncang

Tentang Kami

Majalah TEMPO

Pedoman Media Siber

TEMPO English Magazine

Ketentuan Layanan

Koran TEMPO

Karir

TEMPO Institute

Beriklan

Indonesiana

TEMPO Store

TEMPO.CO English

"Sampai sekarang belum ada usaha pemerintah menyelesaikan. Kasus-kasus itu mau ditangani seperti apa, ini yang ditunggu," kata Amiruddin kepada Tempo saat ditemui se usai konferensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Penegakan HAM di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

Amiruddin mencontohkan kasus intoleransi seperti penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Lombok Timur pada 19-20 Mei lalu. Sampai sekarang, pemerintah dinilai belum memiliki kuasa untuk menjamin kebebasan masyarakat berekspresi dan memeluk agama. Akhirnya, kasus itu mandek dan tak menemui jalan terang.

Menurut Amiruddin, seharusnya pemerintah melakukan prioritas supaya kasus-kasus HAM tidak terabaikan. Pertama, ujar dia, percepatan penyidikan. "Kalau ada percepatan penyidikan, pengadilan bisa digelar," ujarnya.

Baca: [Komnas HAM Beri Rapor Merah Penuntasan HAM di era Jokowi](#)

Selanjutnya, jika pengadilan digelar, vonis hakim akan segera menentukan status pokok perkara. "Apa pun putusan pengadilan ya silakan," ujarnya.

Kedua, kata dia, menyiapkan dasar hukum untuk kasus-kasus yang akan direkonsiliasi. Menurut Amiruddin, sampai saat ini, pemerintah baru mewacanakan rekonsiliasi, namun belum merumuskan dasar hukum.

Di samping itu, kata dia, aduan terus bermunculan. "Yang dilaporkan jumlahnya ratusan," ujar Amiruddin. Apalagi, kini tengah mencuat kasus-kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan proyek-proyek agraria. Menurut Amiruddin, ada sekitar 400 kasus laporan. Namun, penyelesaiannya nihil.

FOKUS



Begitu Cara Myanmar Hadapi Arakan Army dan



Bawaslu Bakal Awasi Ketat Laporan Dana Kampanye



Plus Minus Kebijakan KPU Bocorkan



Pemeriksaan di BPJS TK, Rizky Amelia: Perempuan

Jokowi Komnas HAM Pelanggaran HAM 4 Tahun Jokowi

PILIHAN EDITOR

by

4 Hal Ini Jadi Rekomendasi Komnas HAM untuk Jokowi	Berkat Amulet kekayaan, saya memenangkan 78 juta <small>AD</small>	Kubu Jokowi - Ma'ruf Yakin Unggul Isu HAM di Debat Capres I	Komentar Roger Danuarta Setelah Menjadi Muallaf
BANTU PEMULIHAN ANAK PENDERITA GIZI BURUK! <small>UNICEF</small>	Kalung Lady Gaga di Golden Globes Rp 70 Miliar	4 Senjata Andalan Cina	Windows Antivirus Rankings 2018 - Why Many Are Switching To <small>AD</small>

TERKINI

	Banggakan Doni Monardo, JK: Kepala BNPB Baru Langsung Kerja Coba 46 menit lalu
	Begitu Perjalanan Kasus Wisnu Wardhana Hingga Ditangkap 1 jam lalu
	Ma'ruf Amin Minta Maaf, Adik Ahok Tak Tahu Harus Jawab Apa 1 jam lalu
	Lantik Doni Monardo, Jokowi Pastikan BNPB Tetap di Bawah Presiden 1 jam lalu
	Wiranto: Teror di Rumah Pimpinan KPK Tidak Usah Diributkan 2 jam lalu
	Fadli Zon Minta Bagus Bawana Tidak Dikaitkan dengan Kubu Prabowo 2 jam lalu
	Jokowi: Saya Tiap Hari Guyon Bareng Anies Baswedan 2 jam lalu

Lihat Juga